

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat diukur dari pangsa sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor non migas, penciptaan ketahanan pangan nasional dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Selain itu, sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri.

Pada saat perekonomian nasional dilanda krisis, ternyata sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Pengalaman krisis multidimensi tahun 1997-1998 memberikan pelajaran berharga betapa strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat bagi sistem perekonomian nasional. Sementara itu, sektor-sektor lainnya mengalami keterpurukan sebagai akibat krisis ekonomi tersebut, terutama industri yang banyak komponen impornya (*foot loose industries*).

Sepanjang tahun 2002-2008, lebih dari 40 juta jiwa atau sekitar 44% (persen) angkatan kerja di Indonesia menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian.

Namun demikian, apabila dilihat dari sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode yang sama, ternyata sektor pertanian hanya mampu memberikan kontribusi sekitar 15% (persen).

Tabel 1. Tenaga Kerja dan Nilai Output Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan di Indonesia Tahun 2002-2008

Tahun	Tenaga Kerja (Juta Jiwa)		PDB (Milyar Rupiah)			
	Pertanian	Industri	Pertanian	Agroindustri	Non Agroindustri	Total Industri
2002	40.5 (45.1)	11.7 (13.0)	216 831 (15.60)	240 677 (17.32)	90 641 (6.52)	331 318 (23.84)
2003	39.7 (43.8)	12.1 (13.3)	225 686 (15.64)	242 783 (16.83)	104 646 (7.25)	347 429 (24.08)
2004	40.6 (44.3)	12.1 (13.2)	232 973 (15.47)	247 686 (16.45)	119 523 (7.93)	367 209 (24.38)
2005	42.0 (46.2)	10.9 (12.0)	240 387 (15.24)	260 507 (16.52)	181 248 (11.49)	441 755 (28.01)
2006	40.6 (43.3)	11.1 (11.8)	247 164 (14.92)	269 949 (16.30)	200 003 (12.07)	469 952 (28.37)
2007	41.8 (44.3)	11.7 (12.3)	253 726 (14.49)	279 049 (15.94)	212 373 (12.13)	491 422 (28.07)
2008	40.1 (42.1)	11.9 (12.5)	261 296 (14.15)	291 505 (15.79)	222 687 (12.06)	514 192 (27.84)
Rata-rata	40.7 (44.1)	11.6 (12.5)	239 723 (15.07)	261 736 (16.45)	161 588 (9.92)	423 325 (26.37)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

Ket: Angka dalam kurung menunjukkan persentase.

PDB dihitung atas dasar harga konstan tahun 2002.

Industri yang dimaksud merupakan industri non migas.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian masih relatif rendah. Pada gilirannya tingkat kesejahteraan rumah tangga yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian juga menjadi relatif lebih rendah.

Peran sektor industri terhadap perekonomian nasional menunjukkan gejala yang cukup menggembirakan. Sektor industri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu agroindustri dan non agroindustri. Secara umum definisi agroindustri adalah industri yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian, transformasi struktur perekonomian dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri menghendaki adanya kaitan yang kuat antara sektor pertanian dan sektor industri. Melalui keterkaitan tersebut, diharapkan nilai tambah komoditas pertanian dan penyerapan tenaga kerja menjadi semakin meningkat (Sahrial, 2005).

Dengan berlangsungnya perubahan preferensi konsumen yang makin menuntut atribut produk yang lebih rinci dan lengkap serta adanya preferensi konsumen akan produk olahan, maka motor penggerak sektor pertanian harus berubah dari usaha tani kepada industri pengolahan hasil pertanian (*Agroindustry*), untuk mengembangkan sektor pertanian yang modern dan berdaya saing, maka agroindustri harus menjadi lokomotif dan sekaligus penentu kegiatan subsektor usaha tani dan selanjutnya akan menentukan subsektor agribisnis hulu, paling sedikit ada lima alasan utama mengapa agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan, yakni karena hal-hal berikut (Departemen Pertanian, 2007):

1. Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (*kompetitif*), yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk agribisnis.
2. Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar, sehingga kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan.

3. Memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir (*forward and backward linkages*), sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya.
4. Memiliki basis bahan baku lokal yang dapat diperbaharui sehingga terjamin sustainabilitasnya.
5. Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya.

Pengembangan agroindustri dapat menjadi pilihan yang strategis dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di pedesaan, hal ini disebabkan adanya kemampuan yang tinggi dari sektor agroindustri dalam hal perluasan kesempatan kerja. Pengembangan agroindustri yang berbasis pada masyarakat pedesaan merupakan sektor yang sesuai untuk menampung banyak tenaga kerja dan menjamin perluasan berusaha, sehingga akan efektif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dengan demikian kebijakan pembangunan agroindustri diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah produksi pertanian dan mendorong penawaran hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan agroindustri.

Agroindustri yang dikembangkan adalah agroindustri skala kecil dan rumah tangga (*home industry*) yang mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak.

Pengembangan agroindustri skala kecil dan rumah tangga diharapkan mampu mengatasi masalah pengangguran. Dalam pengembangannya perlu dukungan kuat dari pemerintah, agar agroindustri tersebut mempunyai nilai tambah yang lebih besar.

Strategi pembangunan wilayah yang pernah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan disparitas pembangunan wilayah, yaitu (Rustiadi, 2006):

1. Secara nasional dengan membentuk Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
2. Percepatan pembangunan wilayah-wilayah unggulan dan potensial berkembang, tetapi relatif tertinggal dengan menetapkan kawasan-kawasan seperti Kawasan Andalan (Kadal).
3. Program percepatan pembangunan yang bernuansa mendorong pembangunan kawasan perdesaan dan sentra produksi pertanian seperti Kawasan Sentra Produksi (KSP).
4. Program-program sektoral dengan pendekatan wilayah yaitu Pewilayah Komoditas Unggulan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil.

Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan diharapkan dapat memacu pertumbuhan suatu wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa wilayah memiliki keunggulan pada sektor pertanian yang sebagian besar merupakan usaha tani rakyat. Salah satu model pengembangan wilayah berbasis komoditas saat ini yang sedang dikembangkan oleh beberapa wilayah adalah komoditas kelapa. Tercatat beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan dengan Program Implementasi Gerbang Emas Agroindustri Pengolahan Kelapa Terpadu, dan Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu berbasis Komoditas Kelapa (Bappeda Kab. Lampung Barat, 2006).

Sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan pada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka membangun daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan dan pengembangan kompetensi inti dari masing-masing daerah, agar seluruh sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah difokuskan pada upaya untuk mengembangkan potensi daerah (sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan fasilitas yang ada) secara efektif dan efisien. Kebijakan pembangunan yang dicanangkan Departemen Perindustrian RI sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan nasional industri yaitu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan, mengadaptasi pemikiran-pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, yaitu pengembangan industri melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang berkelanjutan (Pemda Kab. Lampung Barat, 2009).

Program kawasan usaha agroindustri terpadu merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pengembangan komoditas unggulan melalui pendekatan klaster agroindustri, dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, petani kelapa di berbagai negara termasuk Indonesia berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena rendahnya produktifitas serta harga kopra yang rendah dan fluktuatif. Akibat rendahnya pendapatan, petani kelapa menjadi kurang termotivasi untuk mengadopsi teknologi anjuran untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani (Tarigans, 2003). Usaha tani kelapa dalam di Kabupaten Pesisir Barat dilakukan secara tradisional dengan input sarana produksi

yang sangat minimum atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan modal ditambah keyakinan yang berlaku dikalangan masyarakat bahwa usaha tani ini tidak memerlukan pemupukan dan dampaknya adalah rendahnya produktifitas perkebunan kelapa rakyat.

Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk dapat meningkatkan omzet penjualan. Kegiatan promosi merupakan salah satu upaya pelaku usaha ini untuk lebih menstabilkan atau meningkatkan pendapatan, dengan jalan mempengaruhi konsumen baik secara langsung (melalui penjualan langsung) maupun tidak langsung (melalui periklanan, promosi penjualan, dan publisitas), dalam menerapkan kegiatan promosi pelaku usaha harus mengatur alokasi biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan promosi. Pelaku usaha juga harus mempertimbangkan saluran distribusi yang digunakan dalam melakukan pemasaran produk. Dengan menetapkan biaya promosi dan distribusi yang efektif diharapkan akan memberikan hasil yang baik bagi pelaku usaha. Selain itu, penetapan biaya yang terkendali diharapkan perusahaan tidak akan mengalami kerugian dan mampu mendorong peningkatan volume penjualan secara maksimal. Peningkatan volume penjualan akan berdampak pada bertambahnya omzet penjualan yang diterima oleh pelaku usaha tersebut.

Menurut data statistik Dinas Perkebunan Kab. Pesisir Barat Tahun 2005, luas areal tanaman kelapa mencapai 6.326 Ha dengan produksi mencapai 2.413,0 ton. Sedangkan produktifitas tergolong sangat rendah yaitu 681 Kg/Ha/Tahun dalam bentuk Kopra. Rendahnya penghasilan yang diperoleh dari kelapa menyebabkan

pelaku usaha tidak memiliki modal untuk memelihara kebun secara intensif, apalagi menggarap lahan perkebunan secara optimal maupun mengolah hasil.

Produk kelapa yang dihasilkan masyarakat baru berbentuk kelapa butir dan kopra, dengan demikian nilai tambah komoditas sangat rendah. Variasi produk kelapa yang belum dikembangkan ini disebabkan belum tumbuhnya budaya diversifikasi produk olahan kelapa di kalangan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan tentang produk turunan kelapa dalam, disamping teknologi pengolahan yang juga belum dikenal di kalangan masyarakat.

Tabel 2. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kab. Pesisir Barat Tahun 2013

No	Jenis Komoditi	Luas Areal/Ha	Produksi/Ton
1	Kopi	6.973.3	4.470.5
2	Lada	3.913.5	1.873.5
3	Kakao	1.330.5	1.001.8
4	Karet	1.558.0	24.5
5	Kelapa Dalam	7.014.8	7.205.6
6	Kelapa Sawit	6.443.5	58.680.5
7	Cengkeh	2.238.8	213.6

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat 2013

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui luas areal lahan untuk kelapa dalam sangat luas dan produksi kelapa sangat besar dihasilkan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berusaha mendirikan kawasan usaha agroindustri terpadu agar produk yang di hasilkan dari kelapa dalam mempunyai nilai jual tinggi sehingga akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kawasan usaha agroindustri terpadu di Kabupaten Pesisir Barat merupakan perpaduan perencanaan antara Pemerintah melalui Depperin dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang didukung oleh Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT). Wujud kerjasama ini dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU). Dalam kerjasama tersebut dijelaskan bahwa peralatan, teknologi, dan pelatihan disediakan oleh Depperin, sedangkan studi kelayakan dilaksanakan oleh BPPT. Operasional pembangunan kawasan usaha agroindustri terpadu dimulai tahun 2008 di Kecamatan Pesisir Selatan Pekon Biha dan Marang, hingga pada tahun 2013 jumlah sektor usaha yang bergerak di bidang agroindustri kelapa di Kecamatan Pesisir Selatan sampai Desember 2013 sebanyak 250 usaha, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Sektor Usaha Agroindustri

Jenis Usaha	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja	Modal Usaha
Usaha Mikro Kecil	217	5-15	1.000.000-10.000.000
Usaha Menengah	33	>16	>11.000.000

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pesisir Barat 2013

Pembangunan suatu kawasan agroindustri terpadu pada prinsipnya merupakan langkah mempercepat pertumbuhan suatu wilayah dengan motor penggerak ekonomi dari sektor industri. Konsep tersebut sangat tepat bila dilaksanakan pada daerah dengan sumberdaya yang memadai untuk kelangsungan proses produksi, disamping kebijakan pemerintah setempat.

Berdasarkan hal tersebut arahan program pengembangan kawasan perlu disusun sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada. Melalui pembangunan kawasan agrouusaha terpadu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas kelapa.

Tabel 4. Arah Pengembangan Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu

Uraian	Pelaku	Tujuan	Arahan
Pembangunan Kawasan Agrouusaha Terpadu	Pemerintah Daerah	Meningkatkan nilai tambah produk kelapa, Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah	Kawasan Agrouusaha Terpadu
Pemilihan Lokasi	Pemerintah Daerah	Memudahkan koordinasi, ketersediaan bahan baku, kedekatan dengan lokasi pemasaran, Meningkatkan keuntungan usaha	Kecamatan Pesisir Selatan, meliputi :Pekon Biha dan Marang
Pemilihan Produk Prospektif	Pengelola Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu	Pemilihan produk yang memiliki nilai tambah dan pasar yang dapat dikelola oleh manajemen kawasan	Produk dengan Quality Contorl ketat dilakukan oleh manajemen Kawasan seperti: Kelapa parut kering, Minyak Kelapa, Santan Kelapa.
Pemilihan Produk Prospektif	Petani atau UKM	Pemanfaatan hasil sampingan produk kelapa dengan target pasar lokal dan ekspor, serta dapat dilakukan oleh petani/kelompok tani	Produk dengan teknologi dan modal yang tidak terlalu besar seperti :Coco Fiber, Arang Aktif, Nata De Coco, Coco Peat, VCO, dikelola oleh UKM atau Masyarakat.
Prospek Pemasaran	Pemerintah Daerah, UKM, Pengusaha Swasta	Mengetahui sistem pemasaran produk kelapa, sehingga dapat dilakukan perbaikan sistem yang tepat	Mengurangi rantai tata niaga yang panjang melalui peningkatan nilai tambah agar produk dapat diolah.

Sumber : Bappeda Kab. Pesisir Barat

Pembangunan industri dalam suatu kawasan merupakan alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, industri-industri kecil dan menengah dapat ditempatkan dalam kawasan ini sehingga terjadi suatu keterpaduan dan keterkaitan antara satu dengan yang lain, akibatnya dapat menghasilkan efisiensi investasi, pemerataan pelayanan dan efektifitas tujuan pembangunan dapat tercapai. Pembangunan kawasan industri yang berbasis sumberdaya daerah ini akan menciptakan iklim yang sehat, selain nilai tambah produk bahan baku yang meningkat sehingga nilai jual yang ada menjadi tinggi,

juga akan membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini.

Kawasan usaha agroindustri terpadu, merupakan suatu kawasan yang terkait dengan fungsi yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah Pesisir Barat. Kawasan tersebut merupakan kawasan industri yang diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pemda Kab. Lampung Barat, 2009).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap bahwa program kawasan usaha agroindustri terpadu dapat menghasilkan efek berganda seperti :

1. Menumbuhkan industri kecil menengah yang terintegrasi sehingga memudahkan sinkronisasi dan keterpaduan pembinaan.
2. Dengan tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kompetensi inti daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mutu sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang mampu mendapatkan nilai tambah.

Kegiatan pengembangan kawasan usaha agroindustri merupakan konsepsi yang menempatkan kegiatan agroindustri dari produk hasil pertanian atau perkebunan sebagai satuan unit usaha yang berbasis teknologi, berwawasan nilai tambah dan berkembang atas kemampuan daerah.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan Kabupaten Pesisir Barat mengalami kemajuan yang pesat, salah satunya disebabkan banyaknya industri yang mulai membangun kawasan produksinya di daerah tersebut. Munculnya kawasan usaha agroindustri tersebut diharapkan dapat meningkatkan modal usaha, omzet penjualan dan pendapatan usaha di Kecamatan Pesisir Selatan pada khususnya.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak adanya kawasan usaha agroindustri terpadu terhadap peningkatan modal usaha di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan?
2. Bagaimana dampak adanya kawasan usaha agroindustri terpadu terhadap peningkatan omzet penjualan usaha di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan?
3. Bagaimana dampak adanya kawasan usaha agroindustri terpadu terhadap peningkatan pendapatan usaha di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

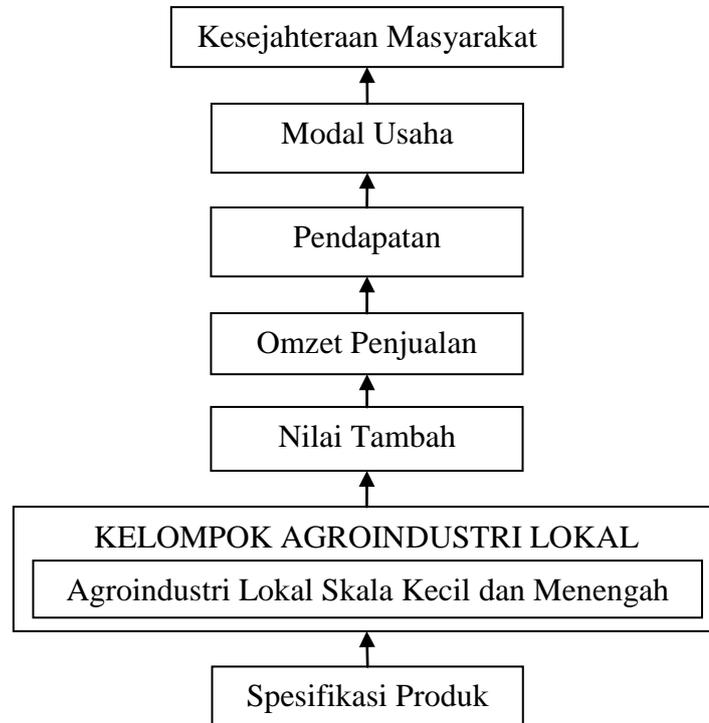
1. Untuk mengetahui dampak adanya kawasan usaha agroindustri terpadu terhadap peningkatan modal usaha di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak adanya kawasan usaha agroindustri terpadu terhadap peningkatan omzet penjualan usaha di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui dampak adanya kawasan usaha agroindustri terpadu terhadap peningkatan pendapatan usaha di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan.

D. Kerangka Pemikiran

Agroindustri merupakan suatu usaha yang mengolah bahan baku utama dengan teknologi tertentu menjadi berbagai produk olahan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa agroindustri merupakan mesin pertumbuhan dalam sistem agribisnis yang pada akhirnya akan menyumbang secara positif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Soekartawi, 2009).

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan sentra agroindustri lokal dengan spesifikasi produknya yaitu kelapa dalam dan produk turunan kelapa adalah untuk sabut kelapa, produk turunannya adalah *coco fiber* dan matras.

Daging kelapa akan menjadi *desicated coconut*, *VCO coconut oil*, dan *biodiesel*, batok kelapa akan menjadi briket arang dan arang aktif, sementara air kelapa akan menjadi *nata de coco* dan kecap.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Agroindustri lokal di perdesaan merupakan kegiatan yang memberdayakan sumberdaya lokal (*indigenous resources*). Seluruh potensi lokal di perdesaan diramu dan dimanfaatkan sehingga menguatkan agroindustri pangan lokal, yang mana pengembangan agroindustri pangan lokal dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari produk yang akan dikembangkan dan diharapkan dengan adanya kawasan usaha agroindustri terpadu ini akan dapat meningkatkan omzet penjualan dari nilai tambah produk tersebut, meningkatkan pendapatan dan modal usaha agroindustri tersebut yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada perbedaan modal usaha antara sebelum dan sesudah adanya kawasan usaha agroindustri terpadu
2. Ada perbedaan omzet penjualan antara sebelum dan sesudah adanya kawasan usaha agroindustri terpadu
3. Ada perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya kawasan usaha agroindustri terpadu

F. Gambaran Umum Wilayah

1. Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat (KPB), merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan pada Tanggal 25 Oktober 2012, kabupaten ini

memiliki penduduk 449,345 jiwa, dan memiliki luas 2.445,89 km². Secara geografis wilayah Kabupaten Pesisir Barat terletak pada posisi 105°45' 103°48' Bujur Timur dan 3°45'-6°45' Lintang Selatan.

Kabupaten Pesisir Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Pesisir Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat diprovinsi Lampung merupakan pemekaran dari wilayah kabupaten lampung barat diprovinsi lampung, ditetapkan bahwa ibukota Kabupaten Pesisir Barat adalah Krui, ibukota terletak tepatnya di daerah pasar krui kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat.

Pemilihan ibukota Kabupaten Pesisir Barat dikecamatan pesisir tengah merupakan solusi terbaik dalam hal pemerataan pembangunan, dikarenakan lokasinya cukup strategis berada dipusat kota.

Pada saat pembentukan Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan, yang meliputi : Bengkunt Belimbing, Bengkunt,Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong.

2. Kecamatan Pesisir Selatan

Kecamatan Pesisir Selatan merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat yang berada di daerah pesisir. Letak geografis Kecamatan Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Krui Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngambur
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Krui Selatan

Topografi Kecamatan Pesisir Selatan merupakan daerah dataran dan merupakan daerah yang relatif panas karena sebagian besar pekon berbatasan langsung dengan samudra , yaitu 10 pekon yang berbatas langsung dengan laut.

Luas Wilayah Kecamatan Pesisir Selatan sebesar 409.17 Km atau 8.26 % dari luas Kabupaten. Jika dibandingkan dengan Kecamatan lain, luas wilayah Pesisir Selatan peringkat ke 3 terluas di Pesisir Barat. Pekon dengan lahan terluas yaitu Pekon Pagar Dalam dengan luas 12% dari luas Pesisir Selatan atau 50.8 Km. Sedangkan pekon dengan lahan tersempit adalah Pekon Tanjung Jati yaitu 2.75 Km tidak sampai satu persen hanya 0.67% dari luas Pesisir Selatan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kecamatan Pesisir Selatan Per Pekon tahun 2013

Pekon	Penduduk (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Marang	2.397	2.197	4.594
Way Jambu	764	704	1.468
Biha	1.371	1.305	2.676
Tanjung Setya	847	793	1.640
Pagar Dalam	224	222	446
Tanjung Jati	152	147	299
Sumur Jaya	679	627	1.306
Pelita Jaya	494	490	984
Sukarame	373	359	732
Nr Tenumbang	636	554	1.190
Tanjung Raya	506	442	948
Bangun Negara	902	828	1.730
Ulok Manik	579	513	1.092
Paku Negara	935	825	1.760
Tulung Bamban*	468	429	897
Total	11.245	10.333	21.578

Sumber : BPS Lampung Barat

G. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, gambaran umum dan sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari tinjauan teoritik dan tinjauan empiris. Berisikan teori-teori ekonomi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini serta penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta acuan dalam penelitian ini.

Bab III. METODE PENELITIAN

Membahas tentang tahapan penelitian, data dan sumber data, batasan variabel, alat analisis serta pengujian hipotesis.

Bab IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan analisis hasil perhitungan secara kuantitatif dan kualitatif.

Bab V. SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN